



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN
SUMATERA SELATAN II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Deleted: LN 1961/178; TLN
NO. 2241

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 P Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada bawah lingkungan Departemen Pertanian;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960.
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN SUMATERA SELATAN II.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II, disingkat "PPN Sumsel II", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dalam lapangan perkebunan.
- (2) Perusahaan-perusahaan PPN Baru yang namanya tersebut di bawah ini:
1. Perkebunan Karet "Kedaton";
 2. Perkebunan Karet "Rejosari";
 3. Perkebunan Karet "Cisaat";
 4. Perkebunan Karet "Rotterdam";
 5. Perkebunan Karet "Bergen";

6. Perkebunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Perkebunan Karet "Wai Berulu";
7. Perkebunan Karet "Kebagusan";
8. Perkebunan Karet "Tangkit Serdang";
9. Perkebunan Karet "Wai Lima";
10. Perkebunan Kelapa Sawit. "Bekri";
11. Perkebunan Karet "Tulung Buyut";
12. Perkebunan Karet "Negerya";
13. Pabrik Tapioka "Metro";
14. Pabrik Peti Teh "Natar";
15. Perkebunan Karet "Sungei Langkat";
16. Perkebunan Kopi Teh "Talang Padang";

dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam PPN Sumsel II termaksud dalam ayat (1) di atas.

- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-perusahaan termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada PPN Sumsel II.
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) PPN Sumsel II adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah PPN Sumsel II;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara;
 - e. "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan di Palembang dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bidang perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpinpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja, dalam perusahaan menu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spirituil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut di at Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil ya sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dima perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

Modal

Pasal 6

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 249.000.000,- (Dua rat empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipup menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah in
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadang rahasia.

Pimpinan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kua Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi ya bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pembantu Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa Direksi.
- (4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kua Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan ya ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.

(5) Selama .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bila mana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum

Pasal 13

- (1) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya Perusahaan.
(2) Perusahaan memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara.

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 14

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

(3) Semua

Formatted: Indent: Hanging:
0.25"

Formatted: Right, Indent:
Hanging: 0.25"



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Formatted: Indent: Hanging: 0.25"

Deleted: ¶

- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Formatted: Centered

Kepegawaian

Pasal 15

Formatted: Indent: Before: 0"

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Formatted: Centered

Tahun Buku

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Formatted: Centered

Anggaran Perusahaan

Pasal 17

Formatted: Indent: Before: 0", Hanging: 1.5"

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.

Formatted: Right, Indent: Before: 0", Hanging: 1.5"

(2) Kecuali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Formatted: Indent: Before: 0", Hanging: 1.5"

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Formatted: Centered

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala
dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 18

Formatted: Indent: Before: 0"

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Formatted: Centered

Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 19

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri, Pengesahan termasuk memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Formatted: Centered

Penggunaan Laba

Pasal 20

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 19, disisihkan untuk :
 - a. dana pembangunan Semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, untuk gaji rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dan pensiun dan sokongan pegawai/pekerja, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.5"

Formatted: Right, Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.5"

(2) Penggunaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.5"

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan la dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadang tujuan dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor Prp. Tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

Pasal 21

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menja milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepa Menteri yang memberi kebebasan tanggungan jawab tentat pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Formatted: Centered

Ketentuan Peralihan

Pasal 22

Formatted: Indent: Before: 0"

Pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan terseb dalam pasal 1 ayat (2) sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belu dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan ol Perusahaan, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Ment Perdagangan.

Formatted: Centered

Ketentuan Penutup

Pasal 23

Formatted: Indent: Before: 0"

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah i ditetapkan oleh Menteri.

Formatted: Centered

Pasal 24

Formatted: Indent: Before: 0"

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlal surut sehingga tanggal 1 Januari 1961.

Formatted: Indent: Before: 0"

Formatted: Right, Indent: Before: 0"

Agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Formatted: Indent: Before: 0"

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Formatted: Indent: Before: 2.88"

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1961
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO

Formatted: Justify Low

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 178.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Formatted: Centered

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 153 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN SUMATERA UTARA II

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan perkebunan P.P.N. Baru sesuai dengan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

Perusahaan perkebunan termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah ini dijadikan satu Perusahaan Negara dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini cara pengurusan dari perusahaan tersebut dapat diperlancar demikian pula pengawasan dan pengamanannya dapat dilakukan lebih seksama.

Untuk tetap menjaga adanya sinkronisasi dan koordinasi dari semua perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara, maka tugas Direksi dari perusahaan ini dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara" sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961.

Untuk melakukan tugas Direksi sehari-hari didalam Perusahaan ini Badan Pimpinan Umum termaksud diatas akan menunjuk seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Kuasa Direksi.

Deleted: ¶

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2241.

Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 no. 178

Diketahui
Pejabat Sekretaris Negara,

Santoso

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

Deleted: ¶

Deleted: —Page Break—